

PROPOSAL PROGRAM PENELITIAN
Kluster Penelitian Terapan

PENGUATAN NASIONALISME DAN INTEGRASI NILAI-NILAI
KEPESANTRENAN MELALUI KEGIATAN PRAMUKA DI
PANGKALAN SLTA NURUL JADID PAITON



- Ketua : 1. MOHAMMAD BAHRUL ULUM, M.Phil
(NIDN: 2110128401)
- Anggota : 2. FARHAN, M.Sos.I.
(NIDN: 2111128402)
3. MUHAMMAD SYARQOWI
(NIM: 141400298)
4. MUHAMMAD IZZAT ABDI
(NIM: 141400308)
5. M. FAUZAN
(NIM: 133305977)

PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS NURUL JADID
PAITON PROBOLINGGO

2018

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai sebuah bangsa, tantangan yang dihadapi Indonesia dari waktu ke waktu semakin kuat dan kompleks, meliputi semua aspek kehidupan. Dalam aspek politik, upaya mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui kebijakan-kebijakan politis. Semakin matang konsep politik, maka akan menunjang dan menguatkan konsep nasionalisme Indonesia, selain konsep Budaya. Karena masyarakat Indonesia sangat plural dan multikultural.¹ Tantangan nyata tampak dalam era globalisme dan atau milenial, dimana era tersebut kini telah merambah kedalam pelosok-pelosok pedesaan. Dengan dampak positif dan negatif yang mengiringi, serta semua produk yang bertebaran di nusantara, tidak sepenuhnya bisa memudahkan unsur nasionalisme warga negara Indonesia. Nasionalisme Indonesia selalu menyesuaikan dengan kondisi zaman, hanya saja butuh penguatan yang cerdas dan tepat bagi generasi bangsa agar tetap menjaga tradisi-tradisi yang mempersatukan kewarganegaraan warga.

Seiring dengan kompleksitas tuntutan masyarakat, reformasi dalam segala bidang, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai dampak dari globalisasi, konsep kebhinekaan yang menjadi “*branding image*” negara kesatuan bangsa Indonesia, kian hari mendapat tantangan yang cukup serius, utamanya berkaitan dengan nasionalisme yang kian hari, kian mengawatirkan. Terlebih kecanggihan teknologi yang menghubungkan satu kepentingan komunitas dengan komunitas lainnya. Informasi menyebar kesegala penjuru sehingga sulit untuk dikendalikan. Bahkan sebagian informasi menjadi fitnah, hoax, termasuk terjadinya kebencian (*hate speech*) yang banyak tersebar di media sosial.²

International Press Institute melaporkan bahwa *hate speech* dapat dikategorikan menjadi beberapa macam, baik menghina secara lisan (*smaad*), surat atau tertulis (*smaadschrift*), memfitnah (*laster*), penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*), mengadu secara memfitnah (*lasterlijke aanklacht*), dan tuduhan secara

¹M. 'Azam Manan dan Thung Ju Lan, *Nasionalisme dan Ketahanan Budaya Indonesia; Sebuah Tantangan*, (Jakarta: LIPI Press, 2011), 4.

²Gun Gun Heryanto, Hoax dan Krisis Nalar Publik: Potret Perang Informasi di Media Sosial, dalam Aep Wahyudin dan Manik Sununtari (ed.), *Melawan Hoax di Media Sosial dan Media Massa*, (Yogyakarta, ASKOPIS Press, 2017), 10-12.

memfitnah (*lasterlijke verdachtmaking*).³ Tindakan-tindakan di atas tentunya dapat dituntut jika ada pengaduan dari individu yang terkena dampak dari *hate speech*. Sebagaimana negara-negara Eropa yang mengenakan hukuman bagi pelaku *hate speech*, demikian pula Indonesia. Beberapa kasus menggambarkan penggunaan *hate speech* yang semakin hari semakin meningkat. Data dari *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFE-net) bahkan menunjukkan bahwa hingga 2016 ada lebih dari 177 pelaporan ke polisi atas dasar tuduhan pencemaran nama baik, penodaan agama, dan ancaman, yang berbasiskan undang-undang.⁴

Upaya membendung penggunaan *hate speech* di media sosial melalui elektronik ini di Indonesia telah dibentuk undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur keamanan dan ketertiban umum dalam penjaminan pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan masyarakat. Kemudian, undang-undang tersebut telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 berdasarkan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum.⁵ Hal ini dilakukan mengingat relevansinya dengan penegakan hukum dalam menjaga keutuhan NKRI. Beberapa pasal yang ada dalam UU ITE direvisi sebagai penyempurnaan dan penyeimbangan dalam menanggulangi kejahatan melalui teknologi informasi. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

³ Terkait sentimen penghinaan simbol negara dan/atau agama misalnya, beberapa negara seperti Cyprus, Denmark, Perancis, Jerman, Yunani, Irlandia, Italia dan negara Eropa lainnya memberikan sanksi denda hingga penjara bagi pelaku *hate speech*. Tindakan tersebut dikategorikan sebagai tindakan kriminal. Lihat Barbara Trionfi, et al., "Out of Balance: Defamation Law in the European Union A comparative overview for journalists, civil society and policymakers," Januari 2015, Vienna: International Press Institute, dalam <http://legaldb.freemedia.at/wp-content/uploads/2015/05/IPI-OutofBalance-Final-Jan2015.pdf>

⁴ SAFE-net juga mencatat munculnya 4 (empat) pola pemidanaan baru yaitu: aksi balas dendam, barter hukum, membungkam kritik dan terapi kejut yang sangat berbeda, jika tidak dapat disebut menyimpang dari tujuan awal ketika UU ITE dibentuk. Informasi lebih lanjut, lihat "Safenets Statement on Current Condition in Indonesia" dalam <http://safenetvoice.org/2016/08/press-release-safenets-statement-on-current-condition-in-indonesia/>.

⁵ Terdapat tujuh muatan materi yang diterapkan dalam undang-undang, salah satunya untuk menghindari multitafsir terhadap ketentuan larangan mendistribusikan, mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan *hate speech*. Namun demikian, para pengamat menilai bahwa revisi undang-undang tersebut berpotensi mengancam kebebasan berekspresi masyarakat Indonesia di ranah digital. Informasi lebih lanjut lihat "Revisi UU ITE membatasi kebebasan berekspresi?" dalam <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38124294>.

disebutkan penyelenggaraan sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan, dan/atau masyarakat.⁶

Terjadinya informasi yang overload bagi masyarakat teknologi menginsyarkan apa yang diistilahkan Mulyana sebagai budaya masyarakat yang penuh tepo seliro, ungguh-ungguh, andap ashor, rasa tanggungjawab dan lainnya, dimana penciptaan budaya itu semestinya terus dijaga dan diwariskan kepada setiap generasi. Pewarisan budaya itu dimaksudkan sebagai bekal generasi penerus dan penyeimbang dalam melakukan komunikasi dan interaksi termasuk dalam menggunakan media sosial, agar tetap memegang teguh nilai-nilai moral demi terjaga ketentraman, kenyamanan, dan keharmonisan dalam masyarakat.⁷ Generasi masa depan dihantui berbagai disintegrasi, baik moral, spiritual, dan sebagainya. sehingga filter terhadap berbagai kemajuan teknologi yang merusak budaya ketimuran perlu diprioritaskan. Khususnya terkait kerukunan umat beragama sebagai modal menjaga keutuhan NKRI, ditengah bahaya terorisme yang sedang marak terjadi. Terbaru menjelang ramadhan 1439 H, dalam pekan kedua Mei 2018, terjadi peristiwa bom bunuh diri, yang diberitakan beberapa media sebagai tindakan teroris yang dikutuk oleh semua kalangan umat beragama. Respon berbagai kalangan datang silih berganti mengutuk aksi teroris tersebut. Tidak terkecuali, Asosiasi Dosen Komunikasi dan Penyiaran Indonesia (ASKOPIS) pusat, melalui pernyataan sikap yang dikeluarkan pada 18 Mei 2018. Salah satu item berbunyi,

“Kami tidak membenarkan sedikitpun adanya tindakan-tindakan radikalisme atau terorisme dengan dalih apapun juga terhadap para pelaku dan aksi pengeboman gereja di Surabaya, Mapolrestabes Surabaya, Rusunawa di Sidoarjo yang terjadi pada 13-14 Mei 2018, dan serangan bom di Mapolda Riau pada 15 Mei 2018, karena hal ini bertentangan dengan perikemanusiaan dan nilai-nilai ajaran agama yang humanis

⁶https://jdih.kominfo.go.id/matriks_perbandingan/view/id/1/t/matriks+perbandingan+uu+no+11+tahun+2008+dengan+uu+no+19+tahun+2016

⁷ Dedy Mulyana dan Jalaluddin rahmat, Komunikasi antar budaya (bandung: Remaja Rosdakarya, 1993, 59. Lihat juga Mukti Ali, Antara Komunikasi, Budaya dan Hoax, dalam Aep Wahyudin dan Manik Sununtari (ed.), Melawan Hoax di Media Sosial dan Media Massa, (Yogyakarta, ASKOPIS Press, 2017)h, 104.

serta dapat berakibat secara fisik dan psikologis bagi korban, keluarga maupun masyarakat pada umumnya”.⁸

Karena itu, negara juga memberikan andil besar dalam menciptakan suasana tertib diantara pemeluk agama melalui kebijakan-kebijakannya. Termasuk dalam undang-undang 1945 jelas dikemukakan pada pasal 29 ayat 1 dan terutama ayat 2’ dimana Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Sehingga, satu pemeluk agama dengan lainnya bisa saling hidup rukun dan bertoleransi tinggi.

Begitu pula yang ditetapkan dalam TAP MPR No. II/MPR/1978, dijelaskan “Dengan sila ketuhanan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan oleh karenanya manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”. Karena itulah muncul pula istilah tri kerukunan hidup umat beragama yaitu “Kerukunan antar sesama umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan umat beragama dengan pemerintah”.⁹

Kerukunan umat beragama menurut penelitian ismail akan tumbuh dengan baik ketika agama diberi ruang untuk berdialog dalam ruang budaya tanpa ada unsur paksaan dari pihak lain. Melalui dialog pula akan tumbuh kedewasaan beragama, yakni kesanggupan untuk saling menghormati perbedaan keyakinan dalam beragama.¹⁰ Berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam mewujudkan kerukunan kehidupan bergama di Indonesia. Pada akhirnya, adanya peran pemerintah melalui pembentukan forum kerukunan umat beragama (FKUB), tataran formal ini cukup memberikan wadah kerukunan umat beragama, menempati posisi sebagai penengah, pemberi informasi, dan membawa suasana kerukunan. Kendati demikian, pemerintah

⁸ Mohammad Zamroni dan Kamila Adnani dalam www.bangkitmedia.com/terorisme-marak-ini-sikap-askopis-indonesia.diakses 19 Mei 2018.

⁹ Departemen Agama RI, *Pedoman Dasar kerukunan Umat Beragama*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Departemen Agama Republik Indonesia, 1989.

¹⁰ Arifuddin Ismail, *Refleksi Pola Kerukunan Umat Beragama ; Fenomena Keagamaan Di Jawa Tengah, Bali Dan Kalimantan Barat, Jurnal Analisa* volume XVII, Nomor 02 Juli-desember 2010, 175-186, dalam www.blasemarang.kemenag.go.id,

harus terus berupaya mengawasi, mengevaluasi dan terus melakukan optimalisasi dalam menciptakan suasana berkehidupan antar pemeluk agama dengan penuh ketenangan dan kedamaian. Karena sejarah Islam masa lalu telah mencontohkan tentang kerukunan hidup yang toleran.

Sebagaimana yang ditulis Marzuki, pasal 25 piagam madinah menyatakan “kaum Yahudi dan Bani ‘Auf adalah salah satu umat dengan kaum mukmin. Bagi kaum Yahudi (bebas memeluk) agama mereka dan bagi kaum muslim (bebas memeluk) agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarga”.¹¹ Ini merupakan jaminan masing-masing pemeluk agama untuk melaksanakan ajaran agamanya masing-masing dengan sebaik-baiknya. Piagam ini senada dengan kandungan surat al-kafirun ayat keenam yang menegaskan tentang kebebasan masing-masing agama terhadap ajarannya tanpa ada rasa saling memaksa.

Menurut, Munawir Sjadzali dalam Marzuki, bahwa ada dua hal penting dalam piagam madinah, yaitu; semua pemeluk agama islam merupakan satu komunitas (umat) walaupun berasal dari suku yang banyak (seperti dalam pasal 1-10, 23-35, 39-42). Kedua; hubungan islam dengan komunitas lainnya didasarkan pada prinsip untuk ‘bertetangga dengan baik’ pada pasal 11. Prinsip tentang ‘saling membantu dalam menghadapi musuh terdapat pada pasal 12,14, 15, 17, 18, 19, 20,22,36,37, 38, dan 43-47. Sedangkan ‘membela mereka yang teraniaya atau kaum lemah yang terdholimi’ terdapat pada pasal 13, 16, dan 21. ‘saling menasehati’ pada pasal 37. ‘menghormati kebebasan beragama pada pasal 15, 16,25-35 dan 40 (Marzuki, 1-17). Semua aspek selain ibadah ritual bagi seorang pemeluk islam sudah diatur sedemikian rupa hubungannya dengan penganut agama lain. Inilah esensi dalam beragama yang harus dilakukan setiap pemeluknya, yakni menjalankan semua perintah dan memberikan keteladanan baik bagi sesama.

Mengingat bahayanya radikalisme bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), gerakan pramuka yang merupakan salah satu media untuk mengatasi problem kebangsaan tersebut, khususnya bagi kalangan santri di Pondok

¹¹Marzuki, *Kerukunan Antar Umat beragama dalam wacana masyarakat madani: analisis isi piagam madinah dan relevansinya bagi Indonesia*. 1-17.

Pesantren generasi penerus bangsa. Seingga tidak ada stereotip yang berkembang ditengah masyarakat perkotaan utamanya bahwa kehidupan pesantren dimanapun berada merupakan penguat terhadap NKRI. Karena NKRI adalah harga mati. Gerakan pramuka merupakan wadah pengembangan potensi peserta didik pramuka dalam pembentukan sumber daya manusia yang sesuai dengan tri satya dan dasa dharma pramuka. Setiap pramuka memiliki peran yang cukup urgen dalam kaderisasi dan penanaman kedisiplinan serta bela Negara bentuk nyata dari upaya mewujudkan nasionalisme warga negara.

Tahapan kaderisasi dalam gerakan pramuka begitu sistematis dan berkesinambung. Bahkan keberadaan dan identitas keanggotaan ditetapkan berdasarkan pembagian usia, anggota muda dibawah usia 25 tahun dan anggota dewasa diatas usia 25 tahun. Tahapan kaderisasi dan system keanggotaan tersebut, memiliki tugas, pokok dan fungsi yang berbeda, dimana masing-masing Pembina memiliki peran yang sama melalui sistem *Among*, yang menitikberatkan pada praktik 'Tut Wuri Handayani' disamping, *ing ngarso sung Tulodo* dan *Ing Ngarso Mangun Karso*.

Semua aspek pengembangan bina diri, bina satuan dan bina masyarakat dalam gerakan pramuka tercermin dalam butir-butir pencapaian syarat kecakapan umum (SKU) yang harus dipenuhi oleh setiap anggota pramuka disetiap golongan, baik siaga penggalang penegak sampai pandega. Area pengembangan tersebut diarahkan kepada empat hal pokok yang dicanangkan oleh kwartir nasional dalam konsep 'SESOSIF', yaitu area pengembangan spiritual, pengembangan emosional, pengembangan social, dan pengembangan intelektual. (Kwarnas, 2011: 7-12)

Karenanya, dalam gerakan pramuka, khususnya di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo, terjalin sinergitas kepemimpinan yang kuat dalam membentuk jiwa-jiwa pramuka sebagai calon pemimpin yang bisa dipertanggungjawabkan. Eksistensi organisasi pramuka hingga kini terutama sudah terintegrasi kedalam kurikulum nasional, sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib bagi peserta didik khususnya di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo.

Karena, sistematika kaderisasi yang terstruktur, berjenjang dan tidak berseberangan dengan dokrin-dokrin kepanduan secara umum. Termasuk berintegrasi dengan dokrin-dokrin lembaga pendidikan pesantren sebagai subkultur

yang ada di nusantara. Karena itu, Kementerian Agama kemudian mencanangkan pramuka santri sebagai bagian dari proses kaderisasi dan sinergi antara gerakan pramuka secara nasional dengan kepentingan pesantren sebagai wadah kaderisasi kepemimpinan dalam aspek agama dan lainnya.

Bahkan dalam perencanaannya perkemahan pramuka santri nusantara (PPPSN) ke-5 tahun 2018 Oktober di Jambi ini, mendapatkan perhatian khusus dari kakak Kwartir nasional, dengan mengusung tiga hal penting; budaya pesantren, budaya nusantara serta nasionalisme¹². Menurut Zayadi, sejarah pesantren adalah sejarah nasionalisme dan patriotisme. Pada masa penjajahan, pesantren merupakan tempat menggembleng para pejuang. Demikian juga saat ini, pesantren terus menggelorakan pentingnya spirit nasionalisme dan patriotisme di saat semangat kebangsaan dihadapkan pada tantangan globalisasi. Pesantren juga menjadi kawah candradimuka bagi santri agar menjadi ahli agama, berjiwa ksatria dan patriotis, serta menghargai kemajemukan dan perbedaan sebagai upaya menjaga kerukunan umat beragama.¹³ Maka, dapat dipastikan peran masing-masing pramuka dan Pembina semakin dihadapkan pada tantangan dan peluang yang sama dalam menjaga NKRI.

Penguatan Nasionalisme Dan Integrasi Budaya Santri Melalui Kegiatan Kepramukaan Pangkalan SLTA Nurul Jadid Paiton Probolinggo, terjalin integratif dan berkesinambung bagai gayung bersambut saling mengisi kekurangan dan kelebihan. Mengingat Pembina pramuka merupakan manusia biasa yang dalam doktrin agama Islam, tidak luput dari salah dan dosa. Kendati demikian, seluruh proses pembinaan mengacu kepada syarat kecakapan umum (SKU) yang berlaku di tingkat pramuka penegak. Yang kemudian diintegrasikan dengan pancakesadaran dan tri logi santri, karena menyesuaikan dengan budaya santri Pondok pesantren Nurul Jadid.

Pramuka Nurul Jadid berada dibawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jadid Karanganyar Paiton Probolinggo Jawa Timur. PP. Nurul Jadid memiliki sedikitnya 12 lembaga formal mulai tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Lembaga tersebut meliputi RA Azzainiyah, MI Nurul Mun'im, MI Azzainiyah I, MI Azzainiyah II, MTs Nurul Jadid, MTs Azzainiyah I, MTs

¹² Lihat : <https://kemenag.go.id/berita/read/506964>

¹³Ibid

Azzainiyah II, SMP Nurul Jadid, MA Nurul Jadid, SMA Nurul Jadid, SMK Nurul Jadid, dan Universitas Nurul Jadid (UNUJA), Pramuka Nurul Jadid juga bersinergi dengan lembaga-lembaga formal lainnya baik swasta ataupun negeri di lingkungan Paiton Probolinggo, misalnya dua lembaga Negeri tingkat menengah dan atas, MTsN 1 dan MAN 1. MAN 1 Probolinggo, yang sebelumnya MAN Karanganyar Paiton Pada awalnya Madrasah ini didirikan oleh Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jadid tahun 1969, dan merupakan Aliyah tertua di Jawa Timur, hingga kemudian madrasah ini dinegerikan. Sedangkan, MTsN 1 Probolinggo, awalnya bernama madrasah Mu'allimin (1964), yang kemudian berubah menjadi Madrasah Tsanawiyah (MTs), tiga tahun kemudian beralih menjadi MTs Negeri.¹⁴

Demikian beragam karakter dalam kegiatan pramuka di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo, masing-masing memiliki peran sama dalam menciptakan dan merealisasikan jiwa pramuka sebagai sosok nasionalis, sosialis, religious, dan humanis, serta bila dikaitkan dengan tradisi tradisi/kultur pesantren sangat relevan. Mengingat tradisi generasi masa kini yang cenderung terombang-ambing dengan identitas diri karena terlena dengan fatamorgana budaya barat yang notabene cenderung berlawanan dengan budaya asli nusantara. Karenanya, penguatan nasionalisme melalui keberperanan pramuka menguatkan nasionalisme dan budaya moderasi islam menjadi hal yang prioritas saat ini, khususnya di lembaga pendidikan pondok pesantren.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis tentang ;

1. Proses penguatan nasionalisme melalui kegiatan kepramukaan pangkalan SLTA Nurul Jadid Paiton Probolinggo
2. Proses integrasi nilai-nilai kepesantrenan melalui kegiatan kepramukaan pangkalan SLTA Nurul Jadid Paiton Probolinggo

¹⁴ www.pramukanuruljadid.org. diakses pada 19 Mei 2018

C. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ;

1. Bagaimana penguatan nasionalisme melalui kegiatan kepramukaan di pangkalan SLTA Nurul Jadid Paiton Probolinggo dilakukan?
2. Bagaimana integrasi nilai-nilai kepesantrenan melalui kegiatan kepramukaan di pangkalan SLTA Nurul Jadid Paiton Probolinggo dilakukan?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan penguatan nasionalisme dan integrasi nilai-nilai kepesantrenan melalui kegiatan kepramukaan di pangkalan SLTA Nurul Jadid Paiton Probolinggo?

D. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

- a. Adek Risma Dedees,¹⁵ *Konstruksi Identitas Nasionalisme Masyarakat Perbatasan: Studi Kasus di Pulau Penawar Rindu, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat perbatasan di Pulau Penawar Rindu, membayangkan nasionalisme secara khas dan berbeda dengan masyarakat yang berada di kawasan perbatasan darat dan kawasan non-perbatasan di Indonesia. Pembayangan nasionalisme pada masyarakat perbatasan tidak bisa dilepaskan dari ikatan sejarah dan budaya di mana Melayu menjadi *raison d'être* identitas bersama yang sifatnya lintas negara.
- b. Sutoyo,¹⁶ *Pengelolaan Kegiatan Pramuka di SMK Negeri 2 Purworejo*. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa; (1) Penanaman karakter dalam kegiatan pramuka dilakukan secara terintegrasi dengan semua kegiatan pramuka baik melalui penyampaian materi ataupun program pendukung. (2) Materi kegiatan pramuka diambilkan dari berbagai sumber dan diberikan tanpa ada unsur militer. (3) Siswa aktif dalam kegiatan pramuka yang ditunjukkan dengan mengikuti latihan rutin setiap minggunya. (4) Penilaian

¹⁵ Adek Risma Dedees, *Konstruksi Identitas Nasionalisme Masyarakat Perbatasan: Studi Kasus di Pulau Penawar Rindu, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam*. TESIS, S2 Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016

¹⁶ Sutoyo, *Pengelolaan Kegiatan Pramuka di SMK Negeri 2 Purworejo*. Tesis. Program Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2013.

dalam kegiatan pramuka dilakukan secara menyeluruh baik penilaian kemampuan anggota dewan penegak maupun penilaian program.

- c. Wahyuni,¹⁷ Pengembangan Program Kegiatan Kepramukaan Dalam Membentuk Nilai–Nilai Karakter Kedisiplinan Peserta Didik SD Negeri Di Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) produk program kepramukaan yang berbasis nilai karakter disiplin dapat disusun, 2) program pengembangan kepramukaan yang disusun terbukti efektif untuk meningkatkan karakter disiplin peserta didik.
- d. Sa’adah Erliani, peran gerakan pramuka untuk membentuk karakter kepedulian sosial dan kemandirian (studi kasus di SDIT Ukhwah dan MIS AN-Nuriyyah 2 Banjarmasin).¹⁸ Hasilnya adalah, Upaya pembentukan karakter pada Gerakan Pramuka disekolah ini adalah pemahaman, keikhlasan, kerja keras, berjuang dengan sungguh-sungguh, ketaatan, pengorbanan, komitmen, persaudaraan, dan kepercayaan. Perangkat pendukungnya berupa prinsip dasar kepramukaan, metode kepramukaan, dan kode kehormatan. Adapun upaya pembentukan karakter pada gerakan pramuka MIS An-Nuriyah 2 Banjarmasin adalah keteladanan, pembiasaan, teguran dan penghargaan.
- e. Penelitian Adid HM.¹⁹ Hasil penelitian terhadap lembaga formal SMP 9, Jalan TH Daud Syah No. 26, Banda Aceh dan MTs Darul Ulum jalan Syiah Kuala No. 5 Banda Aceh ini, menyatakan bahwa penanaman nilai-nilai universal gerakan pramuka disesuaikan dengan jenjang usia anggota dan diwujudkan dalam bentuk kegiatan yang lebih berorientasi pada learning by doing. Hal lainnya, bahwa setiap anggota pramuka didorong untuk menjadi sosok yang mandiri, penuh kepercayaan diri, memberi manfaat pada orang lain dan lingkungannya.

¹⁷ Wahyuni,¹⁷ *Pengembangan Program Kegiatan Kepramukaan Dalam Membentuk Nilai–Nilai Karakter Kedisiplinan Peserta Didik SD Negeri Di Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran*. TESIS. Program Studi Magister Keguruan Guru SD, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, 2017

¹⁸ Sa’adah Erliani, peran gerakan pramuka untuk membentuk karakter kepedulian sosial dan kemandirian (studi kasus di SDIT Ukhwah dan MIS AN-Nuriyyah 2 Banjarmasin), *Jurnal Muallimuna*, Vol. 2 No. 1 Oktober 2016, 36-46.

¹⁹ Afif, HM, ‘Intrenalisasi nilai-nilai keislaman dalam gerakan pramuka: kasus dua sekolah di Aceh, *Jurnal Penamas*, 27(3), 2017, 345-362.

Dari beberapa penelitian tersebut di atas, ternyata belum ada peneliti yang mengkaji tentang penguatan nasionalisme dan integrasi budaya santri melalui kegiatan kepramukaan di pangkalan SLTA Nurul Jadid Paiton Probolinggo, yang mengambil situs penelitian di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Dengan pertimbangan lainnya, bahwa pramuka santri dengan pemahaman wajib militer nantinya, bisa menyesuaikan dengan bentuk nasionalisme sebagai warga negara Indonesia yang baik. Apalagi santri memiliki budaya tersendiri yang memang sangat unik dan juga bisa dibilang 'sakral' dalam budaya-budaya tertentu. Hal inilah yang menjadi keunikan dan *originalitas* penelitian ini, sehingga penelitian ini menarik untuk dikaji secara mendalam sebagai pelengkap dari penelitian-penelitian sebelumnya.

2. Kajian Pustaka

Penguatan nasionalisme merupakan upaya untuk memperkuat semangat kecintaan kepada tanah air. Nasionalisme adalah kecintaan alamiah terhadap tanah air, kesadaran yang mendorong untuk membentuk kedaulatan dan kesepakatan untuk membentuk negara berdasar kebangsaan yang disepakati dan dijadikan sebagai pijakan pertama dan tujuan dalam menjalani kegiatan kebudayaan dan ekonomi.²⁰ Nasionalisme dipahami sebagai sebuah paham tentang mencintai bangsa dan negara sendiri dan atau kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran dan kekuatan bangsa itu; semangat kebangsaan.²¹

Sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia, tentu diiringi kualitas sejarah nasionalisme warga negaranya. Pengorbanan seluruh pahlawan bangsa dalam memperjuangkan kemerdekaan masa penjajahan merupakan bukti konkrit rasa nasionalisme rakyat. Menurut Matori dalam Suwarno, kunci rasa nasionalisme kita terletak pada kebersamaan dan sejarah senasib seperjuangan

²⁰ M. HusinAffan & Hafidh Maksum, *Membangun Kembali Sikap Nasionalisme Bangsa Indonesia Dalam Menangkal Budaya Asing Di Era Globalisasi*, JURNAL PESONA DASAR, Vol. 3 No.4, Oktober 2016, hal 65 - 72

²¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nasionalisme>

masa lalu.²² Dengan perasaan senasib seperjuangan yang dilakukan para leluhur dan pendahulu, tentu mengugah seluruh generasi berikutnya yang tidak secara langsung merasakan perjuangan dan pengorbanan pejuang kemerdekaan. Dengan demikian rasa nasionalisme mudah diingatkan kembali untuk terus di jaga dan dikuatkan.

Budaya merupakan hasil cipta rasa dan karsa manusia. Budaya santri merupakan tradisi atau hasil karya santri pondok pesantren yang secara turun temurun diwariskan. Pewarisan budaya santri cenderung lebih berkembang dalam generasi ke generasi, karena situasi dan kondisi masing-masing pesantren dimana para santri terkadang tidak dapat disamakan. Pesantren salaf tentu memiliki budaya yang berbeda dalam beberapa hal dengan pesantren khalaf (modern) dan terpadu.²³ kebudayaan kita secara nasional menyangkut kesadaran dan identitas sebagai satu bangsa yang sudah dirancang saat bangsa kita belum merdeka. Karena itu, menjaga dan menguatkannya merupakan kepercayaan bagi semua generasi bangsa saat ini dan kedepan.

E. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada;

Pola Penguatan Nasionalisme Melalui Moderasi Islam Pada Kegiatan Kepramukaan Di Pondok Pesantren Perspektif Dramaturgi

1. Penguatan semangat nasionalisme dan patriotism bagi para santri melalui kegiatan kepramukaan di pondok pesantren
2. Upaya memperkuat kegiatan kepramukaan sebagai media untuk melatih dan membina karakter santri
3. Membekali santri tentang bahayanya radikalisme agama terhadap disintegrasi bangsa di Indonesia
4. Penanaman nilai-nilai universal seperti keadilan, persamaan, kerahmatan, keseimbangan yang dimiliki oleh agama Islam yang memiliki akar sejarah yang kuat dalam tradisi keindonesiaan

²² Suwarno Widodo, Implementasi Bela Negara Untuk mewujudkan Nasionalisme, Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume I, No 1, Januari 2011, 18-21.

²³ Zuhriy, M. Syaifuddin. "Budaya Pesantren dan Pendidikan Karakter Pada Pondok Pesantren Salaf." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 19.2 (2011): 287-310.

5. Penguatan terhadap pemahaman Islam Nusantara sebagai agama cinta kasih dan *rahmatan lil alamin*

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pendekatan studi kasus dalam penelitian ini merupakan penelitian yang mendalam tentang individu, satu kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan, dan sebagainya dalam waktu tertentu²⁴. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh diskripsi yang utuh dan mendalam tentang Pola Penguatan Nasionalisme Melalui Moderasi Islam Pada Kegiatan Kepramukaan Di Pondok Pesantren Perspektif Dramaturgi.

Penelitian ini bersifat *understanding* (memahami) terhadap fenomena atau gejala-gejala sosial²⁵, dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena tentang penguatan nasionalisme dan integrasi budaya santri melalui kegiatan kepramukaan di pangkalan SLTA Nurul Jadid Paiton Probolinggo, dengan harapan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena untuk selanjutnya dihasilkan sebuah teori.

Dalam hal ini penulis bermaksud memahami realitas empirik dari fenomena-fenomena yang muncul untuk dipahami dan dimaknai berdasarkan interpretasi penulis, kemudian dibandingkan dengan hasil kajian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Tentu saja, dalam memaknai dan menginterpretasikan informasi dan data, penulis menggunakan referensi untuk dijadikan acuan atau sandaran dan penguat data yang ditemukan di lapangan.

2. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, instrument penelitiannya adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai *human instrument*²⁶, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai

²⁴ <http://mudjiarahardjo.uin-malang.ac.id/materi-kuliah/215-jenis-dan-metode-penelitian-kualitatif.html>

²⁵ Imam Suprayogo & Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2003), 163

²⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2008), 60

kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

Oleh karena itu, penelitian ini dilaksanakan dengan sebaik mungkin, bersikap selektif, hati-hati dan bersungguh-sungguh dalam menjangkau data sesuai dengan kenyataan di lapangan, sehingga data yang terkumpul benar-benar relevan dan terjamin keabsahannya.

3. Data dan Sumber Data

Data adalah sekumpulan keterangan atau bahan yang dapat dijadikan dasar jalan analisis atau kesimpulan²⁷. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa kata-kata, perilaku dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lainnya tentang Penguatan Nasionalisme dan integrasi budaya santri melalui Kegiatan Kepramukaan pangkalan SLTA Nurul Jadid. Kata-kata dan perilaku orang-orang yang diamati, diwawancarai dan didokumentasikan merupakan sumber data utama dan dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman *audio tapes*, pengambilan foto dan lain-lain.

Data dalam penelitian ini terdiri dari orang-orang yang menguasai berbagai informasi yang penulis inginkan, yaitu ; Pengasuh, Ketua Yayasan, Pengurus Pesantren, Bidang Kepramukaan, dan Santri.

Alasan ditetapkannya informan tersebut adalah ; pertama, mereka sebagai pelaku yang terlibat langsung dalam setiap kegiatan pembelajaran di lembaga tersebut, kedua, mereka mengetahui secara langsung tentang persoalan yang akan dikaji oleh peneliti, ketiga, mereka lebih menguasai berbagai informasi secara akurat berkenaan dengan proses pembelajaran di lembaga tersebut.

Dalam pemilihan informan, akan digunakan teknik “sampel bertujuan” *purposive sampling*²⁸, yaitu sampel yang diambil harus memiliki sifat tertentu yang sesuai dengan maksud penelitian dan sifat sampel itu dapat diterima mewakili sifat-sifat populasinya. Selanjutnya, data yang didapat dari informan akan dipilih dengan teknik *snowball sampling*. Teknik *snowball sampling* ini diibaratkan sebagai bola salju yang menggelinding, semakin lama semakin besar.

²⁷ Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), 82.

²⁸ J. Sitorus, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Tarsito, 1985), 80

Proses penelitian ini baru berhenti setelah informasi yang diperoleh diantara informan yang satu dengan yang lainnya mempunyai kesamaan, sehingga tidak ada data yang dianggap baru.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan secara sirkuler dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu; 1) pengamatan peran serta (*participant observation*); 2) wawancara mendalam (*indepth interview*); dan 3) dokumentasi. Khususnya pengumpulan data dalam kegiatan kepramukaan yang diadakan dilembaga penegak yang dijadwalkan masing-masing pembina pramuka dalam gugusdepan.

5. Analisis Data

Sedangkan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu: selama pengumpulan data di lapangan dan setelah data itu terkumpul. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan selama proses pengumpulan data maupun setelah pengumpulan data melalui tahapan-tahapan analisis Milles dan Huberman, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi²⁹.

Reduksi data pada penelitian ini merupakan proses penyederhanaan data, memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian tentang Pola Penguatan Nasionalisme Melalui Moderasi Islam Pada Kegiatan Kepramukaan Di Pondok Pesantren Nurul Jadid Perspektif Dramaturgi. Reduksi data berlangsung secara simulative selama proses pengumpulan data berlangsung, baik dalam bentuk ringkasan, mengkode, menelusuri tema, dan membuat gugus-gugus, membuat partisi dan menulis memo. Reduksi data dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan serta membantu dalam memberikan kode kepada aspek-aspek tertentu³⁰.

20 ²⁹ Mathews B. Milles, A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta : UI Press, 1992),

³⁰ Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-kualitatif*, (Bandung : Tarsito, 1999), 129

Display atau penyajian data merupakan proses pengorganisasian untuk memudahkan data dianalisis dan disimpulkan. Proses ini dilakukan dengan cara membuat matrik, diagram, grafik, skema tentang Pola Penguatan Nasionalisme Melalui Moderasi Islam Pada Kegiatan Kepramukaan Di Pondok Pesantren Perspektif Dramaturgi, sehingga dengan begitu peneliti dapat memetakan semua data yang ditemukan dengan lebih sistematis. Display data ini merupakan tahapan kedua dari kegiatan analisis data, yakni menyampaikan hasil temuan penelitian kepada pembaca atau peneliti lain.

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu bagian dari penelitian sebagai konfigurasi yang utuh. Kesimpulan atau verifikasi dilakukan selama penelitian berlangsung. Makna yang muncul dari data tentang Pola Penguatan Nasionalisme Melalui Moderasi Islam Pada Kegiatan Kepramukaan Di Pondok Pesantren Perspektif Dramaturgi harus selalu diuji kebenarannya dan kesesuaiannya, sehingga validitas terjamin. Pada saat peneliti melakukan pengumpulan data sekaligus melakukan pencatatan dan pemahaman atas jawaban responden, informasi yang telah diperoleh tersebut di cek kembali baik dari sumber yang berbeda maupun menggunakan teknik yang berbeda.

6. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian kualitatif itu mutlak diperlukan, hal tersebut dimaksudkan agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dengan melakukan verifikasi terhadap data. Menurut Emzir³¹ ada empat kriteria yang digunakan dalam pengecekan keabsahan data, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).

G. Personalia dan Jadwal Pelaksanaan

³¹Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Analisis Data Model Bogdan & Biklen, Model Miles & Hubermann, Model Straus & Corbin, Model Spradley, Analisis Isi Model Philipp Mayring, Program Komputer Nvivo*, (Jakarta : PT Raja Gafindo Persada, 2011), 79-81

Penelitian ini merupakan penelitian tim/kolektif yang dilaksanakan oleh peneliti sebagai pelaksana penelitian sampai penelitian ini selesai. Adapun jadwal kegiatan penelitian sebagai berikut ;

NO	KEGIATAN	Mei	Juni	Juli	Agustus - November	Des.
1	Penentuan Lokasi Penelitian					
2	Penyusunan Proposal					
3	Presentasi / Seminar Proposal					
4	Pelaksanaan Penelitian					
5	Analisis Data					
6	Laporan					

H. Rencana Anggaran Biaya

Seluruh Pembiayaan kegiatan penelitian ini merupakan dana dari anggaran belanja kampus Universitas Nurul Jadid sebesar Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) untuk tiap Dosen Tetap yang diberikan sebagai tunjangan penelitian, serta bantuan dari berbagai donatur dan sponshorship yang bersifat tidak mengikat.

DAFTAR PUSTAKA

- Lan, T. J., & Manan, M. A. (Eds.). (2011). *Nasionalisme dan Ketahanan Budaya di Indonesia: Sebuah Tantangan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Heryanto, Gun Gun. (2017) Hoax dan Krisis Nalar Publik: Potret Perang Informasi di Media Sosial, dalam Aep Wahyudin dan Manik Sunuantari (ed.), *Melawan Hoax di Media Sosial dan Media Massa*. Yogyakarta, ASKOPIS Press.
- Trionfi, Barbara., et al., "Out of Balance: Defamation Law in the European Union A comparative overview for journalists, civil society and policymakers," Januari 2015, *Vienna: International Press Institute*, dalam <http://legaldb.freemedia.at/wp-content/uploads/2015/05/IPI-OutofBalance-Final-Jan2015.pdf>
- Mulyana, Dedy., Jalaluddin rahmat, *Komunikasi antar budaya*. bandung: Remaja Rosdakarya, 1993
- Mukti Ali, *Antara Komunikasi, Budaya dan Hoax*, dalam Aep Wahyudin dan Manik Sunuantari (ed.), *Melawan Hoax di Media Sosial dan Media Massa*, (Yogyakarta, ASKOPIS Press, 2017) 104.
- Zamroni, Mohammad dan Kamila Adnani dalam www.bangkitmedia.com/terorisme-marak-ini-sikap-askopis-indonesia.diakses 19 Mei 2018.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Dasar kerukunan Umat Beragama*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Departemen Agama Republik Indonesia, 1989.
- Ismail, Arifuddin. *Refleksi Pola Kerukunan Umat Beragama ; Fenomena Keagamaan Di Jawa Tengah, Bali Dan Kalimantan Barat, Jurnal Analisa* volume XVII, Nomor 02 Juli-desember 2010, 175-186, dalam www.blasemarang.kemenag.go.id,
- Marzuki, *Kerukunan Antar Umat beragama dalam wacana masyarakat madani: analisis isi piagam madinah dan relevansinya bagi Indonesia*.
- Dedees, Adek Risma. *Konstruksi Identitas Nasionalisme Masyarakat Perbatasan: Studi Kasus di Pulau Penawar Rindu, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam*. TESIS, S2 Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016.
- Sutoyo, *Pengelolaan Kegiatan Pramuka di SMK Negeri 2 Purworejo*. Tesis. Program Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2013.
- Wahyuni, *Pengembangan Program Kegiatan Kepramukaan Dalam Membentuk Nilai–Nilai Karakter Kedisiplinan Peserta Didik SD Negeri Di Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran*. TESIS. Program Studi Magister Keguruan Guru SD, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, 2017.

Erliani, Sa'adah. peran gerakan pramuka untuk membentuk karakter kepedulian sosial dan kemandirian (studi kasus di SDIT Ukhwah dan MIS AN-Nuriyyah 2 Banjarmasin), Jurnal *Muallimuna*, Vol. 2 No. 1 Oktober 2016, 36-46.

Afif, HM, 'Intrernalisasi nilai-nilai keislaman dalam gerakan pramuka: kasus dua sekolah di Aceh, Jurnal *Penamas*, 27(3), 2017, 345-362.

M. HusinAffan & Hafidh Maksum, *Membangun Kembali Sikap Nasionalisme Bangsa Indonesia Dalam Menangkal Budaya Asing Di Era Globalisasi*, JURNAL PESONA DASAR, Vol. 3 No.4, Oktober 2016, 65 - 72

Suwarno Widodo, Implementasi Bela Negara Untuk mewujudkan Nasionalisme, Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume I, No 1, Januari 2011, 18-21.

Zuhriy, M. Syaifuddin. "Budaya Pesantren dan Pendidikan Karakter Pada Pondok Pesantren Salaf." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 19.2 (2011): 287-310.

"Safenets Statement on Current Condition in Indonesia" dalam <http://safenetvoice.org/2016/08/press-release-safenets-statement-on-current-condition-in-indonesia/>.

"Revisi UU ITE membatasi kebebasan berekspresi?" dalam <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38124294>.
https://jdih.kominfo.go.id/matriks_perbandingan/view/id/1/t/matriks+perbandingan+uu+no+11+tahun+2008+dengan+uu+no+19+tahun+2016
<https://kemenag.go.id/berita/read/506964>
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nasionalisme>
www.pramukanuruljadid.org. diakses pada 19 Mei 2018